

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim. (2003). *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Adi, Priyo Hari, 2006. “*Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pebdapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*”. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Ajija, Shochrul R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Salemba Empat. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Keuangan Pemerintah Daerah, NTB dalam angka 2010-2014*. <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 08 desember 2015.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bratakusuma Deddy Supriady dan Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dedi Rosadi. 2012. *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan*. Yogyakarta : Andi
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Indraningrum, Try, 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang.
- Insukindro. 2001. *Ekonomi Uang dan Bank.: Teori dan Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta : BPF-UGM
- Maimunah, Mutiara. 2008. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11 (1) : 37-51.
- Mardiasmo (2002). “*Akuntansi Sektor Publik*”. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martini dkk. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012”. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pradita RR. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur”. Universitas Negeri Surabaya.
- Pratiwi (2007). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Pratomo AA. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta”. *Skripsi*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang.
- Putro, Nugroho Suratno, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Setyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (Pendekatan Analisis Jalur)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4, No. 2: 211-228.
- Simanjuntak, Robert A. 2002. *Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM – FEUI, MPKP – FEUI, Dirjen PKPD. Jakarta : Kompas
- Situngkir, Anggiat dan John Sihar Manurung. 2009. *Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara*. Kajian Akuntansi, Vol 4, no 2: 93 – 103 ISSN 1907 – 1442.
- Subagyo. 2003. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Sumodiningrat, G., 2010. *Ekonometrika Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.
- Suratno Putro, Nugroho (2009). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2006-2008)”. Jurnal, Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.